

**IMPLEMENTASI PROGRAM GANDENG GENDONG PADA SUB PROGRAM
“NGLARISI” DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PELAKU UMKM DI
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA**

Titania Permata Putri¹, Arif Kuncoro Dwi Putranto²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN

Email : ¹puputitania2102@gmail.com, ²arifkuncoro60@gmail.com

Abstract

Gandeng Gendong Program, implemented by the Yogyakarta City Government, aims to reduce poverty levels and improve the welfare of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This program is integrated into the Jogja Smart Service (JSS) application under the "Nglarisi" menu, which allows local government agencies (Organisasi Perangkat Daerah or OPD) to order meeting refreshments from MSMEs participating in the Gandeng Gendong Program. This research uses a qualitative approach and a descriptive method. This research uses interview, observation and documentation method. Determination of informants in this research was carried out using purposive sampling. The theoretical framework used in this study is based on Grindlee's theory as outlined in Subarsono (2011:10-16), which includes: (1) Content of Policy; and (2) Context of Implementation. The objective of this research is to understand the implementation of the Gandeng Gendong Program within the "Nglarisi" sub-program in enhancing the economy of MSME operators in the Pakualaman District of Yogyakarta City. The implementation of the Gandeng Gendong Program within the "Nglarisi" sub-program has been carried out effectively but has not yet reached its full potential.

Keywords: *Implementation; Program; MSMEs.*

Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di Pulau Jawa. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi DIY. Tingkat kemiskinan di DIY mendorong pemerintah merancang program-program untuk mengatasi permasalahan tersebut termasuk di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu program yang dapat secara efektif mengatasi masalah sekaligus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Program Gandeng Gendong yang diluncurkan pada tanggal 10 April 2018. Program ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Gandeng Gendong didukung empat landasan hukum utama, yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota tentang Program Gandeng-Gendong Nomor 23 Tahun 2018.

Program Gandeng Gendong terdiri dari dua sub-program, yaitu Layanan Nglarisi dan Dodolan Kampung. Untuk pembatasan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini berfokus pada Layanan Nglarisi, yang merupakan inisiatif untuk memberikan peluang kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta, khususnya di bidang kuliner, agar dapat menyediakan jamuan makan dan kudapan pada waktu makan siang dan rapat untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta. OPD dapat memesan layanan ini melalui aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS).

Alasan peneliti dalam pengambilan lokasi penelitian di Kemantren Pakualaman yaitu dilihat dari jumlah unit UMKM yang paling rendah dibandingkan dengan Kemantren lain yang ada di Kota Yogyakarta. Berikut data Unit UMKM dan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta:

Tabel 1. Unit UMKM dan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta

No.	Kemantren	Jumlah (Unit)	Penyerapan Tenaga Kerja
1	Umbulharjo	1.052	5.415

2	Kotagede	862	4.372
3	Tegalrejo	515	2.919
4	Jetis	485	2.408
5	Gondokusuman	438	2.367
6	Kraton	403	2.294
7	Ngampilan	336	2.053
8	Mergangsan	291	1.598
9	Manrijeron	286	1.560
10	Wirobrajan	276	1.456
11	Danurejan	184	971
12	Gondomanan	189	902
13	Pakualaman	121	803
14	Gedongtengen	135	639

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Terdapat permasalahan dalam Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman ini, diantaranya: (1) kebijakan yang menyulitkan kelompok yang tergabung dalam program tersebut; (2) kelompok usaha yang mengikuti Program Gandeng Gendong tidak berkembang dalam peningkatan ekonomi secara signifikan; (3) kurangnya monitoring, evaluasi, dan koordinasi dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta pada Program Gandeng Gendong; dan (4) Pemesanan dari OPD tidak merata ke semua Kelompok Usaha Gandeng Gendong.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan pada Program Gandeng Gendong yang sudah berjalan di Kemantren Pakualaman, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang, “Implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku UMKM di Kemantren Pakualaman”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara dengan informan terkait, observasi, dan dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban mengenai bagaimana implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” dalam meningkatkan ekonomi pelaku UMKM di Kemantren Pakualaman dengan rinci dan jelas. Dengan

pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” dalam meningkatkan ekonomi pelaku UMKM di Kemantren Pakualaman dalam bentuk uraian naratif.

Teknik penelitian observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dan juga pengaruhnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan mendatangi langsung informan penelitian yaitu di Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, dan pelaku UMKM, untuk menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data seperti bukti kegiatan dari implementasi Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara dan observasi mengenai implementasi dan kendala Program Gandeng Gendong dalam meningkatkan ekonomi pelaku UMKM di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta menjadi sumber data primer. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh berdasarkan dokumentasi dari jurnal, internet, peraturan kebijakan, dokumen-dokumen, dan penelitian terdahulu yang mampu berhubungan dengan penelitian.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dengan *purposive sampling*. Menurut Sugiono dalam Sirait (2021:44), *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” dalam meningkatkan ekonomi pelaku UMKM di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yaitu Divisi Gandeng Gendong di Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Koordinator UMKM di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, dan Pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huberman dalam Pradita (2013:37-40) analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian pustaka sebagai berikut:

Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar pada pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam menyelesaikan masalah sebagai usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan. Berdasarkan Anderson dalam Rusdiani (2017:51), kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, penduduk, masyarakat atau warga negara. Dengan demikian kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga bisa diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan dalam Tachjan (2006:10-21) mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian

suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2011:10-16), dipengaruhi oleh dua indikator, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi program dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan program tersebut. Isi kebijakan program tersebut mencakup hal-hal berikut: (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) Derajat perubahan yang diinginkan; (4) Kedudukan pembuat kebijakan; (5) Pelaksana program; dan (6) Sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya meliputi: (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; serta (9) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan program, khususnya yang berhubungan dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Program Gandeng Gendong muncul, karena Kota Yogyakarta mendapatkan sorotan sehubungan dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Pulau Jawa. Program Gandeng Gendong terdapat inovasi yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi kearifan lokal, sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Konsep ini membawa Pemerintah Kota Yogyakarta untuk bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh *stakeholders*. Mendapatkan sorotan terkait dengan tingkat kemiskinan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan inovasi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis “Segoro Amarto” dengan menerapkan Program Gandeng Gendong melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong ditawarkan pada masyarakat, salah satunya melalui aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dengan menu “Nglarisi” dan Dodolan Kampung. Penelitian ini fokus pada sub program “Nglarisi” yang ada pada Program Gandeng Gendong.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kriteria usaha mikro. Menurut Sumitro dalam Rahmazuri (2019:25-30), usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Program Gandeng Gendong adalah program kerjasama diantara *stakeholder* pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian diantara *stakeholder* pembangunan. Program Gandeng Gendong diciptakan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya (Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, 2018). Program Gandeng Gendong ditawarkan pada masyarakat salah satunya melalui aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dengan mengusung aplikasi dengan nama “Nglarisi” dan Dodolan Kampung. Fokus dalam penelitian ini adalah “Nglarisi”. Jumlah kelompok UMKM yang mengikuti Program Gandeng Gendong “Nglarisi” di Kota Yogyakarta meningkat setiap tahun semenjak berdirinya program tersebut pada tahun 2018 dengan total sebanyak 293 kelompok Gandeng Gendong yang tergabung sampai akhir tahun 2023. Peneliti membatasi Implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” yang diteliti adalah di wilayah Pakualaman Kota Yogyakarta dengan data yang diperoleh terdapat sebanyak 18 kelompok yang terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Ketur dan Kelurahan Purwokinanti.

Peneliti mengambil satu sampel pada masing-masing kelurahan untuk mengetahui sejauhmana Program Gandeng Gendong tersebut berjalan di setiap masing-masing kelurahan yang ada di Kemantren Pakualaman. Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman berjalan sudah sesuai dengan standarnya meskipun masih ada kekurangan dalam implementasinya. Selanjutnya peneliti mendiskripsikan Implementasi Program Gandeng Gendong berdasarkan dari 2 indikator teori Grindle dalam Subarsono (2011:10-16) dengan variabel: (1) Isi Kebijakan (2) Konteks Implementasi.

Isi kebijakan

Isi kebijakan terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Isi kebijakan dari Program Gandeng Gendong ini contohnya yaitu persyaratan untuk mengikuti program tersebut, apa saja yang menjadi aturan dalam program tersebut, manfaat dari program tersebut, dan lain sebagainya. Isi kebijakan sangat penting dalam implementasi program karena menetapkan kerangka kerja, tujuan, dan aturan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah hasil penelitian mengenai isi kebijakan dalam Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman sesuai dengan sub indikatornya:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan: Program Gandeng Gendong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok sasaran melalui pemberdayaan UKM serta mengurangi pengangguran. Implementasi program ini menunjukkan beberapa dampak ekonomi: mendukung usaha lokal dengan mendistribusikan anggaran untuk penyediaan makanan dari UKM lokal, strategi untuk mengurangi kemiskinan dengan mewajibkan anggota kelompok Gandeng Gendong memiliki Kartu KMS dan membantu melariskan produk pelaku usaha kelompok Gandeng Gendong. Beberapa pelaku usaha melaporkan bahwa pendapatan dari Program Gandeng Gendong tidak signifikan dan cenderung stagnan dibandingkan dengan pemesanan dari luar. Pemesanan dari luar memberikan peluang pendapatan yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi pada program ini masih terbatas.

Jenis manfaat yang dihasilkan: Melalui aplikasi ini, pemerintah dapat mengalokasikan dana konsumsi secara transparan, mengurangi risiko korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas. Data anggaran menunjukkan variasi penggunaan dana dari tahun ke tahun, dengan potensi untuk optimalisasi yang lebih baik. Program ini juga berhasil memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait di Kemantren Pakualaman, serta memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses lebih luas kepada pelaku usaha lokal. Namun, tantangan muncul dari meningkatnya persaingan dan kesulitan dalam distribusi yang adil seiring bertambahnya peserta, yang menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan lebih lanjut dalam implementasi program tersebut.

Derajat perubahan yang diinginkan dari Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman mencakup dua aspek utama: peningkatan ekonomi pelaku usaha dengan popularitas *online* yang pada akhirnya meningkatkan pemesanan dan adopsi teknologi digital oleh UMKM. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan pemesanan dan efisiensi operasional UMKM. Namun, tantangan dalam implementasi muncul karena kesenjangan dalam kemampuan teknologi di antara pelaku usaha, terutama yang kurang terampil dengan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada harapan untuk efisiensi dan peningkatan ekonomi melalui digitalisasi, realisasi perubahan terhambat oleh kesulitan dalam penggunaan aplikasi dan teknologi yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha, terutama pelaku UMKM yang berusia tua, atau kurang familiar dengan teknologi. Oleh karena itu, dukungan tambahan dalam pelatihan dan penyederhanaan teknologi mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan secara efektif.

Kedudukan pembuat kebijakan dalam konteks Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman dalam peran dan kedudukan pembuat kebijakan sangat vital untuk keberhasilan implementasi program. Pembuat kebijakan, seperti dinas terkait, bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan yang relevan untuk mendukung UMKM, termasuk memastikan alokasi sumber daya dan dukungan teknis. Koordinasi antara dinas, kemantren, dan pelaku usaha penting untuk menciptakan sinergi dan memastikan program berjalan efektif. Tantangan seperti sosialisasi yang terbatas hanya untuk koordinator dan evaluasi tanpa tindak lanjut yang konkret menghambat pencapaian tujuan. Keterlibatan semua anggota kelompok dan tindak lanjut evaluasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan dampak positif program terhadap UMKM dan ekonomi lokal.

Pelaksana program dalam Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman melibatkan tiga pelaksana utama: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta sebagai pembuat kebijakan, Kemantren Pakualaman sebagai koordinator UMKM, dan Kelompok Gandeng Gendong sebagai pelaku usaha. Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM merancang dan mengimplementasikan kebijakan, Kemantren Pakualaman mengelola koordinasi antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, sementara Kelompok Gandeng Gendong sebagai pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Keberhasilan program sangat bergantung pada kerjasama harmonis dan sinergis antara ketiga pelaksana ini, serta pada koordinasi, komunikasi yang efektif, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan program.

Tantangan dalam integrasi dan kolaborasi harus diatasi untuk memastikan manfaat yang optimal bagi UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman memerlukan dukungan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan yang efektif. Sumber daya tersebut mencakup aspek finansial, infrastruktur, teknologi, serta tenaga kerja terlatih. Program ini berhasil dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan *soft skill*, pendampingan, dan pembinaan yang signifikan, yang membantu para pelaku usaha dalam keterampilan teknis dan interpersonal. Tantangan muncul dalam integrasi anggota yang tidak selalu produktif atau tidak memiliki keterampilan yang relevan, serta dalam keterbatasan pelatihan yang hanya diberikan kepada koordinator. Meskipun ada kemajuan dalam memberdayakan SDM lokal, kualitas peningkatan SDM belum sepenuhnya optimal, sehingga mempengaruhi hasil yang diharapkan dari program. Keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antar sumber daya yang tersedia dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait.

Berdasarkan penelitian terhadap indikator “Isi Kebijakan” Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari dampak positif seperti peningkatan ekonomi lokal dan transparansi anggaran, serta dukungan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui Kartu KMS. Ada tantangan seperti pendapatan yang stagnan dibandingkan dengan pesanan dari luar, persaingan yang ketat, dan distribusi yang belum merata. Program juga perlu dukungan tambahan dalam pelatihan teknologi untuk mengatasi kesenjangan keterampilan di-antara pelaku usaha. Meskipun demikian, sinergi antar pihak terkait dan kualitas pelatihan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai dampak maksimal.

Konteks implementasi

Konteks implementasi merujuk pada kondisi dan lingkungan, di mana suatu program atau kebijakan dijalankan dan diterapkan. Ini mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana program tersebut dirancang, diimplementasikan, dan berhasil dicapai. Konteks implementasi dari Program Gandeng Gendong dalam penelitian ini berada di Kemantren Pakualaman serta bagaimana pengaruh program tersebut bagi masyarakat di Kemantren Pakualaman. Konteks implementasi adalah kunci untuk merancang strategi yang tepat dan memastikan kesuksesan program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah hasil

penelitian mengenai konteks implementasi dalam Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman sesuai dengan sub-indikatornya:

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat pada keberhasilan program ini bergantung pada kekuatan dan strategi masing-masing aktor dalam mengelola sumber daya, menjaga komunikasi yang efektif, serta memastikan partisipasi dan kontribusi yang aktif dari semua anggota. Pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif antara semua pihak terkait adalah kunci untuk mencapai tujuan program dan memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Implementasi Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman melibatkan berbagai aktor dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang signifikan. Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta memiliki kekuasaan dalam merancang dan mengkoordinasikan kebijakan serta strategi komunikasi melalui grup *WhatsApp*, yang memungkinkan informasi dan umpan balik disampaikan secara efisien. Kemantren Pakualaman berperan strategis dalam menyediakan platform pemasaran melalui *website* Pakualaman Advertising Report, yang meningkatkan visibilitas dan penjualan produk UMKM lokal. Sementara itu, kelompok usaha seperti Kembar Kinanti dan Dapur Yu Limah menerapkan strategi internal dengan memfokuskan pada partisipasi aktif dan kerjasama anggota untuk memastikan pembagian kerja yang adil dan keberhasilan kolektif.

Karakteristik lembaga dan penguasa yang terlibat dalam implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” di Kemantren Pakualaman sangat mempengaruhi keberhasilan program. Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta sebagai lembaga penguasa harus memiliki kemampuan administratif yang kuat untuk perencanaan, manajerial, dan dokumentasi yang efektif. Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul akibat kurangnya administrasi yang baik, seperti ketidaklengkapan informasi, kesulitan dalam pemantauan, dan potensi kecurangan. Masalah administrasi, seperti tidak adanya dokumentasi resmi dan ketergantungan pada media sosial untuk laporan, serta peralihan manajerial yang mengurangi frekuensi komunikasi, telah menghambat efektivitas pelaksanaan program. Ketiadaan laporan dan sistem pelaporan yang terstruktur mengakibatkan ketidakjelasan dalam distribusi pendapatan dan potensi kecurangan, yang mempengaruhi keadilan dan transparansi dalam pengelolaan program. Keberhasilan Program Gandeng Gendong bergantung pada karakteristik lembaga yang mampu menyediakan administrasi dan manajemen yang baik, memastikan komunikasi yang efektif, dan

menerapkan sistem pelaporan yang transparan untuk mendukung partisipasi aktif dan adil dari semua pihak terkait.

Kepatuhan dan daya tanggap dalam Program Gandeng Gendong pada penelitian ini yaitu rendahnya literasi digital di kalangan anggota, terutama yang berusia tua, menghambat kelompok dalam mengoperasikan aplikasi yang digunakan dalam program. Kurangnya pendampingan dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM juga menyebabkan rendahnya responsivitas terhadap prosedur program. Kelompok dengan pengalaman usaha yang baik menunjukkan responsivitas yang positif, karena anggota sudah memahami tugasnya dengan baik dan dapat menyesuaikan diri dengan prosedur program. Untuk meningkatkan kepatuhan dan responsivitas, penting untuk memberikan dukungan yang lebih baik dalam hal literasi digital dan arahan yang jelas dari lembaga pengelola program. Kejelasan dalam tujuan dan prosedur serta pelatihan yang memadai akan memperbaiki kepatuhan dan meningkatkan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan penelitian terhadap indikator “Konteks Implementasi” Program Gandeng Gendong di Kemantren Pakualaman sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari keberhasilan dalam merancang kebijakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta serta memanfaatkan grup *WhatsApp* untuk komunikasi efisien. Program juga menghadapi tantangan administrasi seperti kurangnya dokumentasi resmi dan ketergantungan pada media sosial yang dapat mengurangi transparansi dan meningkatkan risiko kecurangan. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap program ini berada pada tingkat sedang, dengan beberapa kelompok memperlihatkan peningkatan kepatuhan berkat arahan yang jelas. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan anggota, terutama yang berusia tua, yang mempengaruhi responsivitasnya terhadap prosedur program. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan dukungan tambahan dalam literasi digital dan arahan yang lebih tegas dari pihak pengelola program, sehingga tujuan program dapat tercapai dengan lebih efektif.

Kendala-kendala dalam Implementasi Program Gandeng Gendong pada Sub Program “Nglarisi” untuk meningkatkan Ekonomi Pelaku UMKM di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut: (1) Pendapatan yang dihasilkan dari Program Gandeng Gendong tidak meningkat secara signifikan. Hal ini dikarenakan pemesanan terbatas dan pemesanan justru lebih banyak dari luar program ini; (2) Terlalu banyak kelompok yang ikut dalam Program Gandeng Gendong mengakibatkan pemesanan tidak merata ke semua kelompok usaha. Terlalu banyak kelompok membuat OPD kebingungan untuk memesan dari aplikasi “Nglarisi”, sehingga

OPD yang pernah satu kali melakukan pemesanan ke salah satu kelompok usaha akan memesan di kelompok tersebut secara terus menerus, dan kelompok usaha lain tidak mendapatkan giliran menerima pesanan; (3) Kesenjangan dalam kemampuan teknologi pelaku usaha. Meskipun ada harapan untuk efisien melalui digitalisasi, realisasinya terhambat oleh pelaku usaha yang kesulitan dalam mengakses teknologi; (4) Sosialisasi terbatas hanya kepada koordinator. Pemberian sosialisasi dan pelatihan seharusnya merata kepada seluruh anggota dalam kelompok sehingga dapat meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman yang merata kepada seluruh anggota kelompok dalam program tersebut; (5) Evaluasi tanpa tindak lanjut. Dengan adanya evaluasi tanpa tindak lanjut dapat menghambat pencapaian tujuan sehingga evaluasi hanyalah formalitas yang pada akhirnya tidak ada perubahan di masa yang akan datang; (6) Anggota kelompok yang tidak produktif. Hal itu dapat menghambat kelompok usaha karena tidak adanya kemampuan para anggotanya sebagai pelaku usaha. Anggota yang tergabung ada yang bukan pelaku usaha, beberapa anggota tidak bisa membuat makanan dan hanya sebagai pelengkap syarat kelompok untuk bisa tergabung dalam Program Gandeng Gendong; dan (7) Kurangnya administrasi yang baik. Terlihat dari ketidaklengkapan informasi yang diberikan membuat kesulitan koordinator UMKM di masing-masing wilayah dalam pemantauan jalannya program sehingga adanya potensi kecurangan prosedur pemesanan.

Kesimpulan

Program Gandeng Gendong, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018, adalah inisiatif kolaboratif di Kota Yogyakarta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memanfaatkan aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS), dengan layanan “Nglarisi” yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan indikator teori Grindle, maka implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” dalam meningkatkan ekonomi pelaku UMKM di Kemantren Pakualaman Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik namun masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masing-masing indikator di bawah ini:

Isi Kebijakan: Program ini berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan transparansi anggaran, memberdayakan UMKM, dan memperkuat koordinasi. Meskipun ada laporan mengenai pendapatan stagnan, program ini berfokus pada kesejahteraan ekonomi dan adopsi teknologi digital oleh UMKM, dengan

kebutuhan tambahan untuk pelatihan teknologi guna mengatasi kendala yang ada. Peran pembuat kebijakan penting, namun tantangan dalam sosialisasi dan evaluasi perlu diperbaiki. Keberhasilan program bergantung pada sinergi antara Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, Kemantren Pakualaman, dan Kelompok Gandeng Gendong, dengan komunikasi dan kerjasama yang efektif. Meskipun program meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, kualitas pelatihan dan integrasi anggota masih perlu perhatian untuk mempengaruhi hasil akhir secara positif.

Konteks Implementasi: Keberhasilan program bergantung pada kolaborasi efektif antara Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, Kemantren Pakualaman, dan kelompok usaha lokal. Penggunaan grup WhatsApp dan platform pemasaran online sangat penting. Namun, administrasi yang kurang baik dan ketergantungan pada media sosial mengurangi efektivitas program. Tantangan dalam kepatuhan dan responsivitas masih ada, meskipun ketua kelompok telah membuat kemajuan dengan memberikan arahan dan dukungan literasi digital. Perbaikan lebih lanjut dalam administrasi dan kepatuhan diperlukan untuk meningkatkan hasil program.

Kendala-kendala dalam Implementasi Program Gandeng Gendong pada Sub Program “Nglarisi” dalam meningkatkan pelaku UMKM di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta meliputi: (1) Pendapatan yang dihasilkan dari Program Gandeng Gendong tidak meningkat secara signifikan; (2) Terlalu banyak kelompok yang ikut dalam Program Gandeng Gendong mengakibatkan pemesanan tidak merata ke semua kelompok usaha; (3) Kesejangan dalam kemampuan teknologi pelaku usaha; (4) Sosialisasi terbatas hanya kepada koordinator; (5) Evaluasi tanpa tindak lanjut; (6) Anggota kelompok yang tidak produktif; dan (7) Kurangnya administrasi yang baik.

Saran

Berdasarkan implementasi Program Gandeng Gendong pada sub Program “Nglarisi” di Kemantren Pakualaman, berikut peneliti sampaikan beberapa saran: (1) Penting untuk mempertimbangkan pengembangan model bisnis baru atau inovasi produk yang dapat meningkatkan daya tarik pasar, sehingga penjualan meningkat; (2) Perlu melakukan kurasi produk dan kelompok sehingga tidak terlalu banyak kelompok yang tergabung dalam program gandeng gendong, sehingga program bisa berjalan lebih efektif; (3) Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan pada pelaku usaha dan anggota kelompok sehingga semua dapat mengoperasikan teknologi tepat guna; (4) Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya untuk koordinator saja, namun juga melibatkan

anggota sehingga informasi dapat merata ke seluruh anggota kelompok; (5) Perlu adanya tindak lanjut dalam evaluasi yang dilakukan sehingga kualitas kelompok Gandeng Gendong dapat meningkat; (6) Koordinator kelompok Gandeng Gendong perlu membuat pembagian kerja sehingga semua anggota terlibat aktif; dan (7) Dinas membuat pelaporan dan daftar kegiatan secara formal sehingga dapat terpantau berjalannya Program Gandeng Gendong.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Pada Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Pradita, Ajif. (2013). *Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu di Desa Karangbanjar Kemantren Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. 37-40. <https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf>.
- Rahmazuri, Nisa. (2019). *Analisis Peran UMKM Dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif ekonomi Islam (Studi Pada Butik Nuo Lambra Bandar Lampung)*.
- Rusdiani, Atik. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen*. 10-57. Lampung: UIN Raden Intan.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. 10-16. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sirait, Afrindo Laoly Pratiwi. (2021). *Pengaruh Desain Produk, Daya Tarik Iklan, dan Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda PCX (Studi Pada Honda PCX Club Jakarta)*. 44.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. 10-21. Bandung: API Bandung

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/26415/perda-kota-yogyakarta-no-23-tahun-2009>.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/65461/perda-kota-yogyakarta-no-11-tahun-2017>.
- Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. https://jdih.jogjakota.go.id/home/produk_hukum/detail/2418
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.